



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)

Taufan Dharmawan¹, Nono Supriatna²

Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstract. *This research is intended to know the influence. This research is conducted because it is still related to the fraud and inefficiency of government apparatus performance in Bandung. This study uses a sample of Organization of Local Government of Bandung City Government in the form of agency and agency. This research uses descriptive verification method with hypothesis test using simple linear regression analysis. The results showed that in Bandung City has done very well. In addition, the performance performance of Bandung City Government apparatus has also been in accordance with the principle of good governance. The results also show a positive influence. H_0 rejected and H_a accepted.*

Keywords: *Internal Control Syste; Performance; Good Governance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan karena masih adanya indikasi terkait dengan kecurangan dan inefisiensi kinerja aparatur pemerintah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan sample Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang berbentuk dinas dan badan sejumlah 23 sample. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di pemerintah Kota Bandung telah terlaksana dengan sangat baik. Selain itu, pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bandung juga telah sesuai dengan prinsip good governance. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Kinerja, Good Governance*

Corresponding author. Email: ²nonoaku@upi.edu

How to cite this article. Taufan Dharmawan, N. S. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 4(1), 941-948. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7716>

History of article. Received: January 2016, Revision: Maret 2016, Published: April 2016

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v4i1.7716

Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu Negara merupakan suatu faktor yang penting dalam kemajuan suatu Negara. Dengan diterapkannya suatu pemerintahan yang baik maka potensi-potensi yang ada di Negara tersebut dapat dikembangkan secara maksimal dan efisien demi memajukan Negara tersebut. Indonesia sebagai suatu Negara berkembang dan memiliki banyak potensi saat ini selalu melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan demi memajukan Negara dan juga menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara intensif melalui instansi pemerintah yang berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang juga memegang kendali atas berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman atas tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Masyarakat itu sendiri dalam hal ini merupakan pihak yang menerima pelayanan dan juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suatu kontrol yang dapat menunjang kegiatan masyarakat.

Beberapa pembenahan yang dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dilakukan seiring dengan babak baru tata kelola pemerintah yang terus berkembang. Perubahan di berbagai sektor pemerintahan menjadi suatu indikasi bahwa reformasi sudah mulai dilakukan. Suatu paradigma yang diterapkan bahwa pemerintah bukan lagi dianggap penguasa melainkan dianggap sebagai pihak yang mengayomi dan melayani masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah semakin serius dalam meningkatkan upaya pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya, *Good Governance* masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini

dapat dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat kabupaten dan kota pada tahun 2013. Dari data tersebut dapat terlihat Predikat yang diraih oleh kabupaten dan kota di Jawa Barat masih belum cukup baik. Terlihat dari predikat yang diraih yaitu sebanyak sebelas Kabupaten/Kota yang mendapat predikat C (Agak Kurang: >30-50) dan tiga belas Kabupaten/Kota yang mendapat predikat CC (Cukup Baik: >50-65) dan tidak ada Kabupaten/Kota yang meraih Predikat B (Baik: >65-75), A (Sangat Baik: >75-85) ataupun AA (Memuaskan: >85-100).

Dalam upaya penerapan prinsip *Good Governance*, pemerintah menerapkan suatu sistem pengendalian seperti yang tercantum dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP dilandasi atas pemikiran bahwa sistem pengendalian internal melekat di setiap kegiatan dan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada juga harus dapat memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dicapai jika seluruh pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien (BPK RI, 2013).

Sistem pengendalian internal pemerintah yang dilaksanakan juga ditujukan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja pemerintah. Kinerja instansi pemerintah itu sendiri merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Almada Primadona (2013) menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu melalui pengawasan internal pada organisasi

pemerintahan guna membenahi dan mengurangi kasus tentang buruknya kinerja pemerintah daerah. Penelitian Almada Primadona juga didukung oleh Wawan dan Lia Anggarsari (2009). Penelitian ini menyatakan dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya, sehingga kinerja pemerintah daerah yang baik dapat dilihat juga dari penilaian pemerintahan.

Pengukuran kinerja pemerintah juga menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengukur tingkat akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Pengukuran kinerja yang baik dan handal merupakan salah satu faktor utama suksesnya sebuah organisasi. Akuntabilitas kinerja instansi juga merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas juga sebagai gambaran bagaimana penggunaan dana yang berasal dari masyarakat dan selain itu menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan secara ekonomis, efisien dan tepat sasaran. Penelitian mengenai kinerja instansi pemerintah dilakukan oleh Azwir Nasir dan Ranti Oktari dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh sebesar 17,4% terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian lain dilakukan oleh Rina Tresnawati (2012) dengan judul Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja dinas pendapatan daerah sebesar 34,81%.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sistem pengendalian internal pemerintah di kota Bandung dan penilaian kinerja pemerintah berbasis *good governance*. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan judul sebagai berikut: “Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)”

KAJIAN LITERATUR

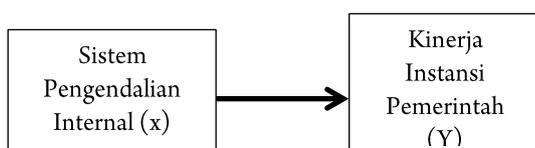
Menurut Arens (2008:258) pengendalian internal adalah sebagai berikut: “Pengendalian internal adalah kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu usaha”.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan *Internal Control Integrated Framework (ICIF)* Definisi pengendalian internal menurut COSO (2013:3) adalah sebagai berikut: “Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini: Efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan pelaporan keuangan, Kepetuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”

Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional. Menurut Mulyadi (1999) mendefinisikan kinerja sebagai “penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagan organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002:121) “sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial” sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena penguatan kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah haruslah menetapkan suatu pengendalian internal yang baik. Isi dari pp no 60 itu sendiri mengadopsi dari pengertian pengendalian internal dari *committee of sponsoring organizations of the treadway commission (coso)*. Dari diberlakukannya peraturan tersebut, diharapkan akan membantu instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi aparaturnya Negara dengan menghasilkan kinerja berbasis *good governance*. *United Nations Development Program (UNDP)* dalam Mardiasmo (2002:12) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a national’s affair at all levels*”, sedangkan *World Bank* lebih menekankan kepada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Mardiasmo (2002) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam *Good Governance* terdapat karakteristik yang dominan. Diantaranya yaitu Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan konsep *Value for money (effectiveness, efficiency, and economic)*. Karakteristik tersebutlah yang dapat membantu menjalankan proses suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis penulis dalam penelitian berjudul “Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah” ini adalah sebagai berikut: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2012:11) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu (independen) dengan variabel (independen) lain”. Kemudian Suharsimi Arikunto (2006:8) menjelaskan bahwa “penelitian yang bertujuan untuk mengecek hasil penelitian lain inilah yang diberi nama penelitian verifikatif”.

Operasional Variabel (1) Variabel implementasi sistem pengendalian internal (independen) Dimensi pada implementasi sistem pengendalian internal menurut Alvin Arens, dkk (2012:294) adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, analisis informasi dan komunikasi serta pemantauan. (2) Variabel kinerja instansi pemerintah Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam *Good Governance* terdapat karakteristik yang dominan. Diantaranya yaitu Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan konsep *Value for money (effectiveness, efficiency, and economic)*.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang berbentuk dinas dan badan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh. Maka dari itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi yaitu Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kota Bandung yang berbentuk dinas dan badan yang berjumlah 23 kantor.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yang digunakan untuk membahas data primer. Dalam hal ini dilakukan pembahasan terhadap pengendalian internal dan kinerja instansi pemerintah.

Uji Validitas

Untuk mengetahui apakah data kuisioner yang diperoleh valid atau tidak. Maka teknik analisis yang digunakan adalah korelasi *Spearman Rank*. Adapun rumus korelasi *Rank Spearman* menurut Sugiyono (2012:124) adalah sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Untuk mengetahui tiap instrumen pernyataan valid atau tidak, maka nilai korelasi tersebut dibandingkan dengan 0,3 dimana jika nilai korelasi (*r*) lebih besar dari 0,3 maka, instrumen tersebut dinyatakan valid, begitu pula sebaliknya.

Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui apakah data kuisioner yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak atau untuk mengetahui sejauh mana kebenaran data yang diperoleh untuk mengukur variabel. Maka teknik analisis yang digunakan adalah metode *cronbach alpha*. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{k}{(k - 1)} \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Sumber: Jogiyanto (2007:136)

Hasil dari perhitungan tersebut, suatu variable dikatakan reliable jika nilai Alpha yang dihasilkan member nilai Alpha >0,60 (Ghozali, 2005:42)

Rancangan Pengujian Hipotesis

Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2013:160) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini digunakan Kolmogorof –

Smirnov (K-S) untuk menghitung distribusi normal data. Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka data tersebut terdistribusi secara normal. Dan begitupun sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standardized.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan suatu nilai dependen (variable Y) yang dalam hal ini adalah kinerja instansi pemerintah dari nilai variable independen (variable X) yang dalam hal ini adalah pengendalian intern. Adapun bentuk persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\hat{Y} = a + b X$$

Menurut Sugiyono (2012:245) harga a dan b dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis :

H₀ : β < 0 Tidak ada pengaruh positif pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

H₁ : β ≥ 0 Ada pengaruh positif pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk sumber data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sugiyono (2011:308) “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Metode pengumpulan data melalui kuisisioner dilakukan dengan cara memberikan pernyataan tertulis kepada responden. Penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi langsung kuisisioner kepada para responden. Setiap paket kuisisioner berisi pertanyaan yang berhubungan dengan pengendalian internal dan kinerja instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Dari pengolahan variabel X didapat nilai koefisien *Cronbatch Alpha* sebesar 0,765. Maka kuisisioner untuk variabel X ini dinyatakan reliabel karena nilai alpha lebih besar dari 0,60. Tampak hasil perhitungan menggunakan *software SPSS* sebagai berikut:

Tabel 1. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,765	17

Berikutnya untuk pengujian reliabilitas terhadap variabel Y didapat nilai koefisien *Cronbatch Alpha* sebesar 0,763 atau lebih

besar daripada 0,60 maka dinyatakan reliabel. Seperti yang terlihat dari perhitungan SPSS sebagai berikut:

Tabel 2. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,763	18

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	22,109	7,941		2,784	,011
	Implementasi Sistem Pengendalian Internal	,781	,109	,842	7,140	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi pemerintah

Analisis Regresi Linier Sederhana Dari analisis regresi linier sederhana yang

dilakukan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 22,109 + 0,781 X$

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 22,109. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen tidak ada atau bernilai nol, maka tingginya kinerja instansi pemerintah yang terjadi sebesar 22,109. Sedangkan pada nilai koefisien implementasi sistem pengendalian internal sebesar 0,781, dimana setiap adanya peningkatan sebesar satu implementasi sistem pengendalian internal maka akan menyebabkan kenaikan pada koefisien kinerja instansi pemerintah sebesar 0,781.

1), Deskripsi Implementasi Sistem Pengendalian Internal di Pemerintah Kota Bandung. Dari data yang telah diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden, diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal dengan sangat baik. Dari perhitungan yang telah dilakukan, dengan skala 0% - 100%, Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan telah mencapai persentase sebesar 89,94%. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan ketentuan dan indikator yang ada.

Namun bila dilihat secara lebih rinci, pada dimensi penilaian resiko masih cukup banyak responden yang memilih pada kriteria sering dan kadang-kadang sehingga skor yang didapat dari dimensi penilaian resiko mendapat skor paling rendah. Maka dari itu, instansi dalam hal ini harus lebih memperhatikan mengenai penilaian resiko dan harus dapat melakukan identifikasi serta menganalisis resiko yang mungkin terjadi serta merumuskan suatu cara untuk menanggulangnya. 2), Deskripsi Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan terkait dengan kinerja instansi pemerintah di pemerintah Kota Bandung, terlihat bahwa prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan sangat memadai. Dari perhitungan yang telah dilakukan, dengan menggunakan skala 0% sampai dengan 100%, pemerintah Kota Bandung mendapat persentase sebesar 92,07%. Namun dari variabel kinerja instansi pemerintah masih

terdapat kelemahan pada indikator proses pengambilan keputusan. Sebagian besar proses pengambilan yang dilakukan oleh instansi hanya melibatkan *top level management* saja dan tidak mengikutsertakan tingkatan manajemen lain. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandung menunjukkan bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja yang ditargetkan oleh dinas dan badan di kota Bandung menyentuh nilai rata-rata sebesar 85%. Hal ini dapat terjadi karena dinas dan badan di pemerintah Kota Bandung telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kerjanya. 3), Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi pemerintah berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai suatu standar kinerja yang diinginkan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pernyataan *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)* yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat membantu entitas untuk mencapai tingkat kinerja yang ditargetkan dan mencegah terjadinya kehilangan sumber daya. Penelitian ini juga sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Sanni Kemal Razali Sukarmaji (2011) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Berbasis *Good Governance* Pada Pemerintah Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis *good governance*. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ruru Rita Kartika (2010) tentang Pengaruh Motivasi Kerja dan

Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Berbasis *Good Governance* di Pemerintah Provinsi Banten yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis *good governance*.

SIMPULAN

Penerapan sistem pengendalian internal di organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Bandung telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan hasil data berupa kuisioner yang berisi pernyataan yang berkaitan dengan implementasi sistem pengendalian internal yang memiliki lima dimensi yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Hasil kuisioner menunjukkan rata-rata jawaban dari responden dalam penerapan sistem pengendalian internal telah diterapkan sepenuhnya.

Organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Bandung yang berbentuk dinas dan badan telah memiliki suatu sistem pengukuran kinerja yang diterapkan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari telah diterapkannya prinsip *good governance* pada dimensi Kinerja Instansi pemerintah yaitu akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi dan juga menerapkan suatu sistem manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilihat berdasarkan persentase nilai dari data yang diperoleh melalui kuisioner.

Terdapat pengaruh positif dari variabel independen yaitu sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariant Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kartika, Ratu Rika. 2010. *Pengaruh Motivasi Kerja dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Berbasis Good Governance pada Pemerintah Provinsi Banten*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi, Johny Setiawan. 1999. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nasir, Azwir., Ranti Oktari. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. Jurnal Ekonomi Vol 19, No 02 (2011).
- Primadona, Almanda. 2013. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarmaji, Sanni Kemal Razali. 2011. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Berbasis Good Governance Pada Pemerintah Kota Sukabumi*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Sukmana, Wawan., Lia Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, vol. 4, no. 1, 2009.
- Tresnawati, Rina. 2012. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Forum Bisnis &Keuangan I tahun 2012